



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA BARAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MARSUDIJONO
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 137994

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.225.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m2/50 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 102 m2/100 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 109 m2/21 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000
4. Tanah Seluas 151 m2 di KAB / KOTA KENDAL, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
5. Tanah Seluas 374 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 144.000.000

1. MOBIL, HONDA FREED MPV Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
3. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000
4. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.156.647.253
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.525.647.253
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.525.647.253

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.